



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan publik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sudah banyak disusun oleh Pemerintah Desa dan sudah pula diimplementasikan. Persoalan yang mendasar adalah bahwa di dalam *content* kebijakan-kebijakan tersebut tidak ditemukan kebijakan yang menunjukkan perhatian secara khusus pada permasalahan pembangunan. Paparan *empiris*, *normative*, dan teoritis yang telah disampaikan dalam Bab I mengarah pada dugaan bahwa penyelesaian masalah pembangunan telah terabaikan sejak tahap *agenda-setting* proses formulasi kebijakan dalam menyelesaikan masalah pembangunan.

Ada tiga argumen yang terbangun dari dugaan ini. Pertama, keberadaan fenomena permasalahan pembangunan mungkin benar-benar tidak dipahami oleh para aktor yang terlibat di wilayah formulasi kebijakan, karena tidak dipahami maka tidak diperhitungkan, sehingga diabaikan dalam proses *agenda-setting*. Kedua, bisa saja permasalahan pembangunan tidak mampu memenuhi kriteria sebagai masalah publik sehingga memang tidak perlu diagendakan dalam formulasi kebijakan publik. Ketiga, mungkin ada tekanan yang luar biasa baik secara internal maupun eksternal pada fase formulasi kebijakan sehingga para aktornya tidak mampu berdiri kokoh membangun *content* yang menjamin tercapainya tujuan yang efektif, efisien, dan ekonomis dalam mengatasi permasalahan pembangunan. Argumentasi-argumentasi ini akan dicoba diklarifikasi melalui diskusi tinjauan pustaka ini.

Ketidakjelasan kebijakan publik secara spesifik di dalam penanganan masalah pembangunan yang di formulasikan ke dalam RPJMDes mengindikasikan adanya masalah di dalam formulasi kebijakannya. Pintu masuk sebuah masalah publik untuk bisa diagendakan atau tidak diagendakan berada di tahap *agenda-setting*. Pemahaman proses *agenda-setting* tidak bisa dilepaskan dari pemahaman pada logika sistem politik, sistem administrasi publik yang dipakai, dan sistem

kebijakan publik yang dianut. Logika-logika ini secara kronologis didiskusikan dalam bab ini.

Pertama, kajian ini diawali dengan eksplorasi dan diskusi hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai formulasi kebijakan.

Kedua, perkembangan paradigma ilmu administrasi publik menjadi sangat penting untuk didiskusikan karena perannya dalam memberikan pondasi pemahaman substansi masalah yang harus dijadikan skala prioritas dalam formulasi kebijakan publik. Perkembangan ilmu administrasi publik dan kaitannya dengan politik secara teoritik dan praktek juga perlu dikaji untuk menggambarkan lingkungan kebijakan publik yang ada, termasuk dikotomi politik-administrasi, *political demands* dan *administrative needs*, yang mewarnai perkembangan ilmu administrasi publik, desentralisasi, dan *good governance*.

Ketiga, di dalam bab ini dipaparkan mengenai teori-teori kebijakan publik sebagai landasan kajian gambar besar kebijakan publik.

Keempat, merupakan diskusi utama dalam tinjauan pustaka ini, yaitu mendiskusikan proses formulasi kebijakan publik dengan kajian mendalam pada proses formulasi kebijakan.

A. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini penulis melakukan kajian kepustakaan dengan melihat penelitian terdahulu agar memperoleh data dari berbagai sumber karya ilmiah pada penelitian terkait formulasi kebijakan pembangunan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa penelitian terdahulu dijadikan sebagai rujukan dan pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai proses formulasi kebijakan pembangunan diantaranya adalah penelitian:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Rosmayanti, Nazaki dan Imam Tahun (2021).

Penelitian dilaksanakan di Desa Mentuda Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga dengan judul “*Formulasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Mentuda Tahun 2016-2021*”. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif teknik

pengumpulan data dan observasi dengan melakukan wawancara dan pengamatan kepada aparat Desa Mentuda kemudian data yang terkumpul di olah dan di analisis secara kualitatif.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui formulasi kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Mentuda dengan pendekatan partisipatif. Kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang analisa formulasi kebijakan rencana pembangunan jangka menengah desa mentuda adalah, dalam tahap perumusan masalah adalah membentuk tim penyusunan RPJM-Desa (tim sebelas) telah dirumuskan dengan cukup baik dari merencanakan, mengorganisasi dan mengkoordinasi kegiatan. Kesimpulan penelitian bahwa formulasi penyusunan dokumen sudah cukup baik karena telah sesuai dengan pedoman yang digunakan, pemilihan alternatif terbaik melalui kesepakatan musyawarah, penetapan kebijakan juga sangat relavan sesuai dengan tujuan mensjahterakan masyarakat.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tema penelitian terkait formulasi kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada tujuan penelitian yaitu: 1) mendeskripsikan dan mengidentifikasi kesiapan program untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJM Desa; 2) mengkomparasi dan menguji perbedaan kapasitas peranan aktor dalam proses formulasi kebijakan untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJMDes. Penelitian akan dilakukan menggunakan metode kuantitaif dengan teknik analisis deskriptif distribusi frekuensi dan komparatif analisis satu arah (*One Way Anova*).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Bustanuddin dan Radjab Dasril Tahun (2021).

Penelitian dilakukan dengan judul "*Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung*". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian

ini merupakan penelitian hukum normatif yang memfokuskan pada asas-asas, prinsip, norma dan isi kaidah hukum dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan desa. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Peraturan perundang-undangan akan dilakukan metode penelaahan terhadap semua perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dilakukan penelitian. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual, yaitu: penelitian yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tentang perlindungan hukum. Adapun peraturan perundang-undangan yang akan dianalisis meliputi peraturan yang terkait dengan pembentukan peraturan Desa Sungai Rotan Tentang Lubuk Larangan.

Ketentuan-ketentuan tersebut berorientasi kepada urgensi dan teori mengenai pluralisme hukum untuk dianalisis akan pengaruh dan relevansinya dalam pembentukan tata hukum lokal dan nasional, sehingga menghasilkan peraturan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian disimpulkan keberadaan produk hukum desa akan memperlancar dan mempermudah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan untuk mempercepat proses kesejahteraan masyarakat di Desa Sungai Rotan.

Keberadaan produk hukum desa juga berfungsi dalam mengatur serta meningkatkan pendapatan Desa Sungai Rotan serta meningkatkan berbagai program-program pembangunan dalam melaksanakan berbagai fungsinya secara baik dan benar, seperti fungsi pelayanan kepada masyarakat (*public services*), fungsi pembangunan (*development*), dan fungsi perlindungan kepada masyarakat (*society protection*). Pengaturan berkaitan Pembentukan Peraturan Desa yang tepat akan menjadikan proses pembangunan daerah desa akan berkembang dengan cepat dan

baik. Pembentukan Peraturan Desa bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan desa.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu bertujuan 1) mendeskripsikan dan mengidentifikasi kesiapan program untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJM Desa; 2) mengkomparasi dan menguji perbedaan kapasitas peranan aktor dalam proses formulasi kebijakan untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJMDes. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif distribusi frekuensi dan komparatif analisis satu arah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sutikno Chamid; Wijaya Shadu Satwika & Zaelani Andi Tahun (2020).

Penelitian yang dilakukan dengan judul “*Formulasi Kebijakan Pembangunan Di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas*”. Tujuan penelitian untuk mengetahui (1) Proses penyusunan kebijakan pembangunan di Desa Dermaji; (2) Mengidentifikasi faktor yang menentukan penyusunan kebijakan pembangunan di Desa Dermaji sehingga dapat memperoleh berbagai bentuk penghargaan prestasi pembangunan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan proses formulasi kebijakan yang meliputi aspek konseptualisasi masalah dan peranan kepemimpinan. Pengembangan opsi alternatif dalam proses pembangunan di Desa Dermaji dengan pendekatan partisipatif serta memadukan model elit dalam pengambilan keputusan sebagai pilihan alternatif kebijakan dan model partisipasi masyarakat pada keseluruhan tahapan pelaksanaan kebijakan melalui *social collaborative action*.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu bertujuan 1) mendeskripsikan dan mengidentifikasi kesiapan program untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJM Desa; 2) mengkomparasi dan menguji perbedaan kapasitas peranan aktor dalam proses formulasi

kebijakan untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJM Desa Dermaji Tahun 2018-2024 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif distribusi frekuensi dan komparatif analisis satu arah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Alviah Tahun (2020)

Penelitian dilakukan di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan judul *“Formulasi Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan”*. Pembangunan merupakan salah satu program kerja dan merupakan bagian dari misi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Melaksanakan pembangunan adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah dalam wujud kebendaan yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga negara. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup warga negara serta mengatasi masalah sosial yang disebabkan oleh kesenjangan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan juga bermakna sebagai pemenuhan tuntutan keadilan sosial. Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi yang bersangkutan.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan Analisis data model Miles dan Huberman, Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa mengenai formulasi kebijakan kepala desa dalam pembangunan di desa beringin taluk ini pada awalnya terdapat beberapa hambatan sehingga pada akhirnya hambatan-hambatan ini dapat teratasi oleh pemerintah desa beringin taluk dan menjadikan perumusan dalam pembangunan yang dilakukan di desa beringin ini sudah baik.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu bertujuan 1) mendeskripsikan dan mengidentifikasi kesiapan program untuk

mengatasi masalah pembangunan dalam RPJM Desa; 2) mengkomparasi dan menguji perbedaan kapasitas peranan aktor dalam proses formulasi kebijakan untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJMDes. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif distribusi frekuensi dan komparatif analisis satu arah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dani Tahun (2020).

Penelitian dilakukan dengan judul “*Desain Penelitian Dan Pengembangan Formulasi Kebijakan Dana Desa Berbasis Pendekatan Systems Thinking*”. Hasil penelitian ini menyimpulkan, Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan wilayah pedesaan di Indonesia. Kesalahan fokus anggaran dana desa ini disebabkan karena proses perencanaan kebijakan desa yang dilakukan seadanya. Kunci meningkatkan kebijakan dan tata-kelola pemerintahan desa yaitu pendekatan berbasis pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Metode perumusan pemikiran yaitu *meta-analysis* terkait *meta theory, meta methods* dan *meta-data*.

Hasil studi literatur merumuskan pendekatan *Systems Thinking* terkait perumusan desain kebijakan desa yang lebih partisipatif. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam desain kebijakan dana desa yaitu; pengembangan daya dukung dan penyiapan proses perumusan kebijakan dana desa sebagai titik kritis praktek kebijakan desa, integrasi kebijakan pembangunan desa, pentingnya menciptakan tata kelola *agile-adaptive*, desain kebijakan yang bersifat operasional dan hubungan kausal dan evaluasi terkait kebijakan dana desa. Semua itu dirumuskan dalam desain *meta-analysis* berupa diagram alur desain kebijakan yang dapat dimanfaatkan sebagai pedoman riset penelitian mengenai pengembangan formulasi kebijakan dana desa.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu bertujuan 1) mendeskripsikan dan mengidentifikasi kesiapan program untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJM Desa; 2) mengkomparasi

dan menguji perbedaan kapasitas peranan aktor dalam proses formulasi kebijakan untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJMDes. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif distribusi frekuensi dan komparatif analisis satu arah.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Andhika Lesmana R. Tahun (2019).

Penelitian dilakukan dengan judul “*Model Sistem Dinamis: Simulasi Formulasi Kebijakan Publik*”. Model Sistem Dinamis dapat menjadi alat pendukung pengambilan keputusan praktis yang memungkinkan untuk menguji berbagai skenario formulasi kebijakan. Penelitian ini berfokus untuk menggambarkan Model Sistem Dinamis formulasi kebijakan dalam sebuah simulasi, tujuan dari penerapan model tersebut untuk mengamati berbagai struktur yang kompleks, dan mungkin memengaruhi tujuan berdasarkan fenomena masalah yang teridentifikasi. Selain itu, Model Sistem Dinamis dapat melihat perubahan perilaku kebijakan dan memungkinkan skema umpan balik untuk memberikan arus terpilih. Untuk mengembangkan argumentasi penelitian ini juga merujuk kepada beberapa kasus penelitian terdahulu dan diperlakukan sebagai bukti.

Hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa dalam model simulasi formulasi kebijakan dengan sistem dinamis digunakan aspek *analysis*, *planning*, dan *control*. Ketiga aspek ini menyediakan sarana untuk menilai kemungkinan penyebab penyimpangan, menghasilkan berbagai kemungkinan analisis dari berbagai sumber informasi, metode, referensi untuk menetapkan umpan balik dari semua analisis yang terkait dalam sistem dinamis. Dengan demikian memberikan peringatan dini tentang perlunya tindakan lebih lanjut, namun dari ketiga aspek tersebut mungkin menimbulkan efek, perubahan dan penyimpangan satu bagian dari sistem, dan sering berbeda dari pada yang dimaksudkan. Untuk itu penyimpangan memberikan sinyal untuk analisis tambahan, apakah kebijakan/strategi telah diterapkan secara efektif.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu bertujuan 1) mendeskripsikan dan mengidentifikasi kesiapan program untuk

mengatasi masalah pembangunan dalam RPJM Desa; 2) mengkomparasi dan menguji perbedaan kapasitas peranan aktor dalam proses formulasi kebijakan untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJMDes. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif distribusi frekuensi dan komparatif analisis satu arah.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Satispi dan Muhamad Taslim.Tahun (2019).

Penelitian dilakukan dengan judul *“Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah untuk Pemuda Di Kota Tangerang Selatan”*. Masalah penelitian terkait permasalahan sosial pada pemuda, berangkat dari masalah kepemudaan diantaranya masalah pengangguran, perilaku pemuda yang beresiko kepada kriminalitas, premanisme, dan penyalahgunaan narkoba, belum adanya payung hukum yang mengatur tentang pembangunan kepemudaan di kota tangerang selatan ini serta sarana prasarana pemuda.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi kebijakan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Kepemudaan di Tangerang Selatan. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan teori tahapan formulasi Riant Nugroho. Dalam tahap tahap formulasi kebijakan Riant Nugroho lebih mengedepankan tahapannya dalam memformulasi sebuah kebijakan peraturan atau undang-undang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan tahapan dalam melakukan formulasi kebijakan pembangunan kepemudaan yang dilakukan pemerintah kota tangerang selatan telah diterapkan dengan baik sehingga menghasilkan kebijakan perda pembangunan kepemudaan di Tangerang Selatan. Tidak hanya tahapan formulasi saja yang menjadi perhatian dari sisi internal, kepemudaan juga mengalami kendala seperti kerjasama lintas Organisasi Perangkat Daerah yang belum sinkron dalam hal program

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu bertujuan 11) mendeskripsikan dan mengidentifikasi kesiapan program untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJM Desa; 2) mengkomparasi dan menguji perbedaan kapasitas peranan aktor dalam proses formulasi kebijakan untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJMDes. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif distribusi frekuensi dan komparatif analisis satu arah.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Wilson, dan Epelle, Tahun (2015).

Penelitian dilakukan dengan judul dengan judul “*Public Policy Formulation And Implementation In Contemporary Nigeria*”. Penelitian yang dilakukan mencoba mengkaji aktor dan institusi yang terlibat dalam proses kebijakan publik negara, serta faktor-faktor terbuka dan terselubung yang mengefektifkan pilihan kebijakan mereka pada periode 2000-2018. Sementara yang pertama memungkinkan akses ke pengetahuan dan informasi tentang bagaimana pemerintahan dijalankan di negara lain, yang terakhir telah memperkuat warga negara, gagasan bahwa mereka adalah pemangku kepentingan dalam administrasi publik dan bahwa satu-satunya cara untuk menghindari pemerintahan yang buruk adalah dengan membuat mereka aktif. Perhatian tentang bagaimana kebijakan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari dirumuskan dan dilaksanakan.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menguji beda kapasitas peranan aktor yang terlibat dalam membuat formulasi kebijakan publik.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Millar Tahun (2020).

Penelitian yang dilakukan dengan judul “*Puzzling Publics: The Role Of Reflexive Learning In Universal Pre-Kindergarten (UPK) Policy Formulation In Canada And The US*”. penelitian ini Membangun teori pembelajaran sosial dan perubahan kebijakan, artikel ini berpendapat bahwa pembelajaran reflektif menyediakan mekanisme kausal tentang bagaimana keterlibatan publik dalam kebijakan formulasi dapat memicu

inovasi kebijakan. Pembelajaran refleksif adalah cara belajar yang terjadi selama perumusan kebijakan dan kemungkinan besar terjadi di area kebijakan yang ditandai oleh ketidakpastian dan kompleksitas yang cukup besar (kemampuan menangani masalah rendah) dan partisipasi berbagai aktor (sertifikasi aktor rendah). Artikel ini berpendapat bahwa refleksif proses pembelajaran dapat merestrukturisasi masalah kebijakan dan memperluas menu yang tersedia pilihan kebijakan dan mendorong elit kebijakan dan warga negara untuk secara kolektif memperbarui keyakinan mereka, menghasilkan inovasi kebijakan. Penelitian ini menyelidiki kemungkinan mekanisme kebijakan perubahan melalui studi banding pembuatan kebijakan universal pra-TK di-AS dan Kanada. Melalui dua perbandingan berpasangan (Florida dan California; Ontario dan Alberta), dalam penelitian ini ditemukan bahwa inovasi kebijakan terjadi ketika publik terlibat dalam kebijakan.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu bertujuan 1) mendeskripsikan dan mengidentifikasi kesiapan program untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJM Desa; 2) mengkomparasi dan menguji perbedaan kapasitas peranan aktor dalam proses formulasi kebijakan untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJMDes. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif distribusi frekwensi dan komparatif analisis satu arah.

10. Penelitian dilakukan oleh Johanna Hornung and Nils C Bandelow Tahun (2018).

Penelitian dilakukan dengan judul “*The Programmatic Elite In German Health Policy: Collective Action And Sectoral History*”. Rumusan masalah penelitian tersebut yaitu: apakah biografi elit kebijakan membuat perbedaan dalam proses dan keluaran kebijakan? Teori-teori terkemuka dari proses kebijakan fokus pada penjelasan lain yang sebagian besar berasal dari kekhasan politik Amerika. Artikel ini mentransfer pendekatan Prancis untuk mempelajari proses kebijakan dalam kebijakan kesehatan Jerman yang menekankan bagaimana

perspektif Prancis ini menghadirkan nilai tambah dalam bentuk kerangka tindakan terprogram. Pada intinya, kerangka aksi program mengusulkan agar elit program di sektor kebijakan terbentuk atas dasar persimpangan biografis bersama dan terhubung ke program bersama. Menerapkan kerangka kerja tindakan terprogram untuk kasus Jerman dari elit program dalam kebijakan kesehatan yang mendominasi seperempat abad terakhir reformasi besar, analisis mengungkapkan kekuatan penjelas kerangka tindakan terprogram dalam konteks politik lainnya. Pengalihan kerangka kerja tindakan programatik ke negara lain dan isu-isu kebijakan, bagaimanapun, harus menghormati kekhususan sistem politik dan subsistem kebijakan.

Persamaan penelitian adalah tentang kebijakan publik Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu bertujuan 1) mendeskripsikan dan mengidentifikasi kesiapan program untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJM Desa; 2) mengkomparasi dan menguji perbedaan kapasitas peranan aktor dalam proses formulasi kebijakan untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJMDes. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif distribusi frekuensi dan komparatif analisis satu arah.

Tabel 1. Penelitian terdahulu

NO	Nama Peneliti Dan Judul penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1	Rosmayanti, Nazaki dan Imam (2021) dengan judul Formulasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Mentuda Tahun 2016-2021	Penelitian yang dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data observasi dengan melakukan wawancara dan pengamatan lebih kepada aparat Desa Mentuda kemudian data yang terkumpul di olah dan di analisis secara kualitatif dengan pendekatan model partisipatif. Hasil penelitian dalam tahap perumusan masalah, tahap yang dilakukan adalah membentuk tim penyusunan RPJMDes (tim 11) telah dilakukan engan baik mulai dari proses merencanakan, mengorganisasi dan mengkoordinasi kegiatan. Dari dokumen yang diteliti disimpulkan formulasi penyusunan dokumen sudah sudah baik kerena sudah dilakukan sesuai dengan pedoman yang digunakan, memilih alternatif terbaik, kesepakatan melalui musyawarah mufakat dan kebijakan yang diambil sangat relevan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilkukan yaitu bertujuan 1) mendeskripsikan dan mengidentifikasi kesiapan program untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJM Desa; 2) mengkomparasi dan menguji perbedaan kapasitas peranan aktor dalam proses formulasi kebijakan untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJMDes.. Penelitian menggunakan metode kuantitaif dengan teknik analisis deskriptif distribusi frekuensi dan komparatif analisis satu arah.	Tema penelitian tentang proses formulasi kebijakan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa) dan objek penelitian adalah seluruh aktor yang terlibat dalam proses formulasi
2	Bustanuddin dan Dasril Radjab (2021) Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan	Penelitian yang dilakukan oleh Bustanuddin dan Dasril Radjab yaitu terkait Formulasi Peraturan Desa Tentang Lubuk Larangan Tentang Lubuk Larangan. Penelitian ini mengkaji bagaimana Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Tentang Lubuk Larangan. Pembentukan Peraturan Desa ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk hukum yang dapat memberikan perlindungan akan memberikan jaminan kelestarian akan keberadaan lubuk larangan yang terdapat di Desa sungai Rotan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memfokuskan pada asas-asas, prinsip, norma dan isi kaidah- hukum dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Pembentukan peraturan desa melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (<i>statute approach</i>), dan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>) (Marzuki, 2012).	Persamaan penelitia yang dilakukan oleh Bustanuddin dan Dasril Radjab dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama melakukan penelitian terkait formulasi kebijakan

Tabel 2. Lanjutan tabel 3 penelitian terdahulu

		Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu bertujuan 1) mendeskripsikan dan mengidentifikasi kesiapan program untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJM Desa; 2) mengkomparasi dan menguji perbedaan kapasitas peranan aktor dalam proses formulasi kebijakan untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJMDes. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif distribusi frekuensi dan komparatif analisis satu arah.	
3	Sutikno, Chamid Wijaya, Shadu Satwika Zaelani, Andi. (2020) dengan judul Formulasi Kebijakan Pembangunan Di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas	Penelitian yang dilakukan dengan judul Formulasi Kebijakan Pembangunan Di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas dengan tujuan untuk mengetahui proses penyusunan kebijakan pembangunan dan mengidentifikasi faktor yang menentukan penyusunan kebijakan pembangunan sehingga dapat memperoleh berbagai penghargaan prestasi pembangunan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan proses formulasi kebijakan yang meliputi aspek konseptualisasi masalah dan peranan kepemimpinan. Pengembangan opsi alternatif dalam proses pembangunan di Desa Dermaji dengan pendekatan partisipatif serta memadukan model elit dalam pengambilan keputusan sebagai pilihan alternatif kebijakan dan model partisipasi masyarakat pada keseluruhan tahapan pelaksanaan kebijakan melalui <i>social collaborative action</i> Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu bertujuan 1) mendeskripsikan dan mengidentifikasi kesiapan program untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJM Desa; 2) mengkomparasi dan menguji perbedaan kapasitas peranan aktor dalam proses formulasi kebijakan untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJMDes. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif distribusi frekuensi dan komparatif analisis satu arah.	Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tema penelitian dan tempat penelitian.

Tabel 3. Lanjutan tabel 3 penelitian terdahulu

4	Nur Alviah (2020) dengan judul Formulasi Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	Penelitian yang dilakukan oleh Nur Alviah tentang Formulasi Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah. Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan Analisis data model Miles dan Huberman, Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa mengenai formulasi kebijakan kepala desa dalam pembangunan di desa beringin taluk ini pada awalnya terdapat beberapa hambatan sehingga pada akhirnya hambatan-hambatan ini dapat teratasi oleh pemerintah desa beringin taluk dan menjadikan perumusan dalam pembangunan yang dilakukan di desa beringin ini sudah baik. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu bertujuan 1) mendeskripsikan dan mengidentifikasi kesiapan program untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJM Desa; 2) mengkomparasi dan menguji perbedaan kapasitas peranan aktor dalam proses formulasi kebijakan untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJMDes. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif distribusi frekuensi dan komparatif analisis satu arah.	Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terkait tema penelitian yaitu Formulasi kebijakan
5	Dani dkk (2020) dengan judul Desain Penelitian Dan Pengembangan Formulasi Kebijakan	Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan wilayah pedesaan di Indonesia. Kesalahan fokus anggaran dana desa ini disebabkan karena proses perencanaan kebijakan desa yang dilakukan seadanya. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu bertujuan 1) mendeskripsikan dan mengidentifikasi program apa yang disiapkan untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJMDes; (2) mengeksplanasi proses formulasi kebijakan untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJMDes Desa Dermaji Tahun 2019 – 2025 Kecamatan	Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait perumusan kebijakan

Tabel 4. Lanjutan tabel 3 penelitian terdahulu

		Lumbir Kabupaten Banyumas Meneliti tentang fenomena tertentu melalui analisis data yang diolah dari data sekunder terpilih. Untuk mengembangkan argumentasi penelitian ini juga merujuk kepada beberapa kasus penelitian terdahulu dan diperlakukan sebagai bukti. Hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa dalam model simulasi formulasi kebijakan dengan sistem dinamis digunakan aspek <i>analysis</i>, <i>planning</i>, dan <i>control</i>. Ketiga aspek ini menyediakan sarana untuk menilai kemungkinan penyebab penyimpangan, menghasilkan berbagai kemungkinan analisis dari berbagai sumber informasi, metode, referensi untuk menetapkan umpan balik dari semua analisis yang terkait dalam sistem dinamis. Dengan demikian memberikan peringatan dini tentang perlunya tindakan lebih lanjut, namun dari ketiga aspek tersebut mungkin menimbulkan efek, perubahan dan penyimpangan satu bagian dari sistem, dan sering berbeda dari pada yang dimaksudkan. Untuk itu penyimpangan memberikan sinyal untuk analisis tambahan, apakah kebijakan/strategi telah diterapkan secara efektif. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu bertujuan 1) mendeskripsikan dan mengidentifikasi kesiapan program untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJM Desa; 2) mengkomparasi dan menguji perbedaan kapasitas peranan aktor dalam proses formulasi kebijakan untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJMDes Dermaji Tahun 2018-2024 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas	
--	--	---	--

Tabel 5. Lanjutan tabel 3 penelitian terdahulu

7.	Satispi & Taslim (2019) dengan judul <i>Formulation of Local Development Policy for Youth In South Tangerang City</i>	Penelitian yang dilakukan oleh Satispi & Taslim tentang Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah untuk Pemuda Di Kota Tangerang Selatan. Masalah penelitian terkait permasalahan sosial pada pemuda, berangkat dari masalah kepemudaan diantaranya masalah pengangguran, perilaku pemuda yang beresiko kepada kriminalitas, premanisme, dan penyalahgunaan narkoba, belum adanya payung hukum yang mengatur tentang pembangunan kepemudaan di kota tangerang selatan ini serta sarana prasarana pemuda. Penelitian ini tujuan untuk menganalisis formulasi kebijakan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Kepemudaan di Tangerang Selatan. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus enelitian ini menggunakan teori tahapan formulasi Riant Nugroho. Dalam tahap tahap formulasi kebijakan Riant Nugroho lebih mengedepankan tahapannya dalam memformulasi sebuah kebijakan peraturan atau undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan tahapan dalam melakukan formulasi kebijakan pembangunan kepemudaan yang dilakukan pemerintah kota tangerang selatan telah diterapkan dengan baik sehingga menghasilkan kebijakan perda pembangunan kepemudaan di Tangerang Selatan. Tidak hanya tahapan formulasi saja yang menjadi perhatian dar sisi internal, kepemudaan juga mengalami kendala seperti kerjasama lintas Organisasi Perangkat Daerah yang belum sinkron dalam hal programPerbedaan dengan penelitian yang akan dilkukan yaitu bertujuan 1) mendeskripsikan dan mengidentifikasi kesiapan program untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJM Desa; 2) mengkomparasi dan menguji perbedaan kapasitas peranan aktor dalam proses formulasi kebijakan untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJMDes. Penelitian menggunakan metode kuantitaif dengan teknik analisis deskriptif distribusi frekuensi dan komparatif analisis satu arah.	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Satispi & Taslim dengan penelitian yang akan dilakukan terkait tema penelitian tantang formulasi kebijakan publik
----	---	---	---

Tabel 6. Lanjutan tabel 3 penelitian terdahulu

8.	Goddey Wilson, Ph.D dan Prof. Alafuro Epelle, Ph.D (2015) dengan judul <i>Public Policy Formulation And Implementation In Contemporary Nigeria</i>	Penelitian yang dilakukan oleh Goddey Wilson, Ph.D dan Prof. Alafuro Epelle, Ph.D mencoba mengkaji aktor dan institusi yang terlibat dalam proses kebijakan publik negara, serta faktor-faktor terbuka dan terselubung yang mengefektifkan pilihan kebijakan mereka pada periode 2000-2018. Sementara yang pertama memungkinkan akses ke pengetahuan dan informasi tentang bagaimana pemerintahan dijalankan di negara lain, yang terakhir telah memperkuat warga negara, gagasan bahwa mereka adalah pemangku kepentingan dalam administrasi publik dan bahwa satu-satunya cara untuk menghindari pemerintahan yang buruk adalah dengan membuat mereka aktif. Perhatian tentang bagaimana kebijakan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari dirumuskan dan dilaksanakan. formal yang saling ketergantungan sehingga membentuk suatu jaringan atau komunitas sehingga peneliti dalam melakukan penelitian akan menggunakan pendekatan perbedaan kapasitas peranan aktor dalam proses formulasi kebijakan.	Mendeskripsikan dan mengidentifikasi peran aktor yang terlibat dalam membuat kebijakan publik serta anggapan bahwa masyarakat adalah pemangku kepentingan dalam administrasi publik.
9.	Millar, Heather Davidson, Adrienne White, Linda A. University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada (2020) dengan judul <i>Puzzling Publics:</i>	Penelitian yang dilakukan oleh millar dengan judul <i>Puzzling Publics: The role of reflexive learning in universal pre-kindergarten (UPK) policy formulation in Canada and the US</i> membangun teori pembelajaran sosial dan perubahan kebijakan, artikel ini berpendapat bahwa pembelajaran refleksif menyediakan mekanisme kausal tentang bagaimana keterlibatan publik dalam formulasi kebijakan dapat memicu inovasi kebijakan. Pembelajaran refleksif adalah cara belajar yang terjadi selama perumusan kebijakan dan kemungkinan besar terjadi di area kebijakan yang ditandai oleh ketidakpastian dan kompleksitas yang cukup besar (kemampuan menangani masalah rendah) dan partisipasi berbagai aktor (sertifikasi aktor rendah). Refleksif proses pembelajaran dapat merestrukturisasi masalah kebijakan dan memperluas menu yang	Penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan mempunyai anggapan yang keterlibatan publik dalam formulasi

Tabel 7. Lanjutan tabel 3 penelitian terdahulu

	<i>The role of reflexive learning in universal pre-kindergarten (UPK) policy formulation in Canada and the US</i>	tersedia pilihan kebijakan dan mendorong elit kebijakan dan warga negara untuk secara kolektif memperbarui keyakinan mereka menghasilkan inovasi kebijakan. Penelitian ini menyelidiki kemungkinan mekanisme kebijakan ini perubahan melalui studi banding pembuatan kebijakan universal pra-TK di-AS dan Kanada. Melalui dua perbandingan berpasangan (Florida dan California; Ontario dan Alberta), mencoba membangun teori pembelajaran sosial dan perubahan kebijakan sementara penelitian yang akan dilakukan akan mengkomparasi dan menguji perbedaan kapasitas peranan aktor dalam proses formulasi kebijakan untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJMDes. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif distribusi frekuensi dan komparatif analisis satu arah.	sama bahwa kebijakan dapat memicu inovasi kebijakan.
10	Johanna Hornung and Nils C Bandelow <i>Comparative Politics and Public Policy, University of Braunschweig, Germany</i> (2018) dengan judul <i>The programmatic elite in German</i>	Penelitian yang dilakukan berfokus pada, apakah biografi elit kebijakan membuat perbedaan dalam proses dan keluaran kebijakan?. Teori-teori terkemuka dari proses kebijakan fokus pada penjelasan lain yang sebagian besar berasal dari kekhasan politik Amerika. Artikel ini mentransfer pendekatan Prancis untuk mempelajari proses kebijakan dalam kebijakan kesehatan Jerman. Ini menekankan bagaimana perspektif Prancis ini menghadirkan nilai tambah dalam bentuk kerangka tindakan terprogram. Pada intinya, kerangka aksi program mengusulkan agar elit program di sektor kebijakan terbentuk atas dasar persimpangan biografis bersama dan terhubung ke program bersama. Menerapkan kerangka kerja tindakan terprogram untuk kasus Jerman dari elit program dalam kebijakan kesehatan yang mendominasi seperempat abad terakhir reformasi besar, analisis mengungkapkan kekuatan penjelas kerangka tindakan terprogram dalam konteks politik lainnya. Pengalihan kerangka kerja tindakan programatik ke negara lain dan isu-isu kebijakan, bagaimanapun, harus	Persamaan penelitian adalah tentang kebijakan publik sama bahwa keterlibatan publik dalam formulasi kebijakan dapat memicu inovasi kebijakan.

		menghormati kekhususan sistem politik dan subsistem kebijakan. Di Jerman, peran khusus dari	
--	--	---	--

Tabel 8. Lanjutan tabel 3 penelitian terdahulu

	<i>health policy: Collective action and sectoral history</i>	pemerintahan sendiri meningkatkan kategori analitis dari kerangka kerja tindakan terprogram, bergerak melampaui konflik tradisional antara penjaga dan austerian negara. Perbedaannya yaitu: Fokus dalam penelitian yang sudah dilakukan adalah, apakah biografi elit kebijakan membuat perbedaan dalam proses dan keluaran kebijakan. Teori-teori terkemuka dari proses kebijakan fokus pada penjelasan lain yang sebagian besar berasal dari kekhasan politik Amerika dengan mentransfer pendekatan Prancis untuk mempelajari proses kebijakan. Sementara penelitian yang akan dilakukan berfokus pada, apakah ada perbedaan kapasitas peranan aktor dalam proses formulasi sehingga berpengaruh pada ketersediaan program. Sementara grand teori penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori kebijakan Anderson dan teori formulasi Jhon Kingdon	
--	--	--	--

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu yang dilakukan di Indonesia, terdapat persamaan penelitian yang akan dilakukan adalah meneliti terkait proses formulasi kebijakan pembangunan dan fokus penelitian permasalahan lebih mengarah pada aktor dan institusi yang terlibat dalam proses formulasi, norma dan kaidah hukum dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pembentukan peraturan desa, tahapan formulasi. Pendekatan teori pada umumnya menggunakan model formulasi kebijakan. Kemudian keterbaruan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengangkat ketersediaan program pembangunan sebagai agenda kebijakan yang diformulasikan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan perbedaan kapasitas peran aktor dalam proses formulasi kebijakan untuk mengatasi masalah pembangunan. Sedangkan perbedaan dan persamaan serta keterbaruan penelitian yang dilakukan di negara lain yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Wilson dan Epelle, (2015) Penelitian dilakukan dengan judul *Public Policy Formulation And Implementation In Contemporary Nigeria*. Kesamaan penelitian yang sudah dan akan dilakukan adalah mencoba mengkaji aktor dan institusi yang terlibat dalam proses kebijakan publik, perbedaannya adalah pada penelitian yang akan dilakukan mendeskripsikan ketersediaan program untuk mengatasi masalah pembangunan. Sementara penelitian yang sudah dilakukan mendeskripsikan faktor-faktor terbuka dan terselubung yang mengefektifkan pilihan kebijakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Millar, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada (2020) Penelitian yang dilakukan dengan judul *Puzzling Publics: The role of reflexive learning in universal pre-kindergarten (UPK) policy formulation in Canada and the US*. Persamaan penelitian yang sudah dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang formulasi kebijakan. Penelitian yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan berpendapat bahwa keterlibatan publik dalam proses formulasi dapat memberikan inovasi kebijakan. Sementara penelitian yang akan dilakukan perbedaan penelitian

yang sudah dilakukan mencoba membangun teori pembelajaran sosial dan perubahan kebijakan sementara penelitian yang akan dilakukan mencoba menguji beda kapasitas peranan aktor pada proses formulasi kebijakan.

Penelitian dilakukan oleh Hornung and Bandelow *Comparative Politics and Public Policy*, (2018). Penelitian dilakukan dengan judul *The programmatic elite in German health policy: Collective action and sectoral history*.

Persamaan penelitian yang sudah dilakukan terkait proses formulasi kebijakan. Perbedaannya yaitu: Fokus dalam penelitian yang sudah dilakukan adalah, apakah biografi elit kebijakan membuat perbedaan dalam proses dan keluaran kebijakan. Teori-teori terkemuka dari proses kebijakan fokus pada penjelasan lain yang sebagian besar berasal dari kekhasan politik Amerika dengan mentransfer pendekatan Prancis untuk mempelajari proses kebijakan. Sementara penelitian yang akan dilakukan berfokus pada, apakah ada perbedaan kapasitas peranan aktor dalam proses formulasi sehingga berpengaruh pada ketersediaan program. Sementara grand teori penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori kebijakan Anderson dan teori formulasi Jhon Kingdon.

Penelitian yang dilakukan Capano & Simon (2019). Penelitian dilakukan dengan judul *Causal Logics and Mechanisms In Policy Design: How And Why Adopting A Mechanistic Perspective Can Improve Policy Design*. Persamaan penelitian yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan yaitu, desain kebijakan berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan yang efektif untuk mengatasi permasalahan. Perbedaan penelitian yang sudah dilakukan berfokus pada, apakah dan seberapa efektif kebijakan dapat dirumuskan dan diimplementasikan dan mengidentifikasi langkah-langkah kunci untuk diambil dalam mengadopsi pendekatan mekanistik untuk desain kebijakan. Sementara penelitian yang akan dilakukan berfokus pada kesiapan program kebijakan yang diformulasikan sehingga efektif dalam mengatasi permasalahan pembangunan.

Keterbaruan penelitian yang akan sudah dilakukan, sampai saat ini pada umumnya meneliti bagaimana kebijakan dipindahkan dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain, model formulasi yang digunakan, beberapa dari penelitian telah yang telah dilakunan mengeksplorasi efek mikro-interaktif dari aktor. Tujuannya adalah untuk menemukan bagaimana kekuatan aktor berinteraksi dalam proses pembuatan kebijakan untuk mempengaruhi hasil. Sementara penelitian yang akan dilakukan akan mendeskripsikan kesiapan program yang dihasilkan dari proses formulasi kebijakan dan perbedaan kapasitas peran tujuannya adalah menguji tingkat dominasi kelompok aktor dalam proses formulasi kebijakan.

B. Landasan Teori

1. Kebijakan Publik dan Administrasi Publik

a) Konsep Kebijakan Publik

Konsep kebijakan menurut berbagai pakar ahli seperti sebagai berikut:

(1) Kebijakan menurut Anderson, (2003).

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah. Kebijakan merupakan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.

Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut, Anderson memandang kebijakan adalah memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga secara tegas membedakan antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan

(*decision*) yang diartikan sebagai pemilihan diantara berbagai alternatif.

(2) Menurut Dye (1978).

Kebijakan merupakan keputusan yang diambil atau tidak diambil dan atau dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. *“To do or not to do”*.

(3) Menurut Friedrich.

Kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas maka dapat disimpulkan: Kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dipilih atau tidak dipilih dan sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah yang mengandung unsur keputusan berupa pilihan diantara alternatif-alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu sebagai upaya memecahkan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sarana dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan melakukan suatu tindakan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hubungan konsep kebijakan publik dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, akan meneliti terkait ketersediaan kebijakan program pembangunan apa yang dipilih dan diputuskan oleh Pemerintah Desa Dermaji untuk memecahkan permasalahan pembangunan di Desa Dermaji dalam kurun waktu tertentu yang diformulasikan dalam Rencana Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Desa Dermaji.

2. Kaitan Kebijakan Publik Dengan Ilmu Administrasi Publik

Hubungan kebijakan publik dengan ilmu administrasi publik adalah, kebijakan publik merupakan fokus dalam ilmu administrasi publik. Kebijakan publik berasal dan dibuat oleh pemerintah sebagai dinamisasi dari negara bertujuan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan atau kenegaraan (Thoha, 2005).

Dalam administrasi publik terdapat permasalahan-permasalahan publik yang hanya dapat diselesaikan melalui kebijakan publik. Kebijakan publik hanya dapat diputuskan dan dijalankan oleh pemerintah. Fokus administrasi publik adalah pelayanan publik (Thoha, 2005; Winarno, 2007).

Kebijakan publik menjadi kajian penting dalam ilmu administrasi publik. Kebijakan publik menyangkut kepentingan orang banyak, berdampak luas dan berhubungan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat (Thoha, 2005; Winarno, 2007).

Berdasarkan para pendapat ahli diatas, hubungan penelitian yang akan dilakukan dengan Ilmu Administrasi Publik adalah, dalam administrasi publik terdapat permasalahan-permasalahan publik yang hanya dapat diselesaikan melalui kebijakan publik. Penelitian yang akan dilakukan untuk meneliti proses formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2024 Desa Dermaji. RPJMDes merupakan Rencana Kebijakan Pembangunan yang dipilih dan ditetapkan untuk diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan publik. Untuk itu penelitian ini sangat erat hubungannya dengan Ilmu Administrasi Publik. Selanjutnya dalam perkembangannya administrasi publik terdapat pergeseran paradigma ke paradigma lainnya. Berikut adalah perkembangan administrasi mulai dari dikotomi politik Woodrow Wilson hingga *Governance* Nicolas Henry (Suwitri, 2013) sebagai berikut:

Tabel 9. Pergeseran paradigma administrasi publik

Paradigma 1 (1990 - 1926)	Dikotomi Politik-Administrasi Penekanan pada LOKUS (di mana administrasi harus berada), tidak mempersoalkan apa fokusnya. Administrasi publik berfokus pada birokrasi pemerintah. Pemerintah mempunyai dua fungsi yang berbeda yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Tokoh Penting dalam paradigma ini adalah : Frank J Goodnow, Leonard D White.
Paradigma 2 (1927 - 1937)	Prinsip-prinsip Administrasi Paradigma ini menekankan pada fokus keahlian esensial dalam bentuk prinsip-prinsip administrasi. Locus birokrasi pemerintah yaitu administrasi negara menempatkan diri pada pencarian prinsip-prinsip administrasi negara agar pencapaian tujuan dan keinginan negara dapat berjalan dengan efektif dan efisien pada organisasi bentuk apapun. Prinsip-prinsip administrasi dalam paradigma ini adalah POSDCORB baik di organisasi publik atau privat. Tokoh penting dalam paradigma ini adalah : Willoughby, Gullick dan Urwick.
Paradigma 3 (1950 - 1970)	Paradigma ini membangkitkan perubahan politik dan sosial sehingga implementasi kebijakan negara dapat berjalan sesuai dengan harapan. Pemikiran ini merupakan cikal bakal perkembangan ilmu administrasi publik. Tokoh penting dalam paradigma ini adalah Simon.
Paradigma 4 (1956 - 1970)	Administrasi Publik Sebagai Ilmu Manajemen Pada paradigma ini, ilmu administrasi negara mencari induk yaitu ilmu administrasi. Ilmu administrasi negara merupakan gabungan dari teori organisasi dan ilmu manajemen. Teori administrasi dalam mempelajari perilaku organisasi menggunakan pendekatan ilmu sosial, administrasi niaga, administrasi negara dan sosiologi. Sedangkan ilmu manajemen dalam mempelajari perilaku menggunakan pendekatan ilmu statistik, komputer, analisa sistem dan ekonomi. Ilmu administrasi negara berlaku universal. Memisahkan prinsip antara organisasi publik dan privat. Locus ilmu administrasi negara pada organisasi publik.. tokoh penting dalam paradigma ini adalah : Litchfield, dan Millet.
Paradigma 5 (1970 -)	Administrasi publik sebagai administrasi publik Administrasi publik sebagai bidang yang diakui mempunyai lokus dan fokus yang jelas. Dengan diketemukannya fokus antara organisasi publik dan organisasi bisnis yang mempunyai tujuan yang berbeda, keterkaitan ilmu administrasi negara dengan ilmu politik dalam proses kebijakan negara mendorong para ilmuwan administrasi negara terlibat dalam ilmu kebijakan (policy science) dan ekonomi politik (political economy). Proses perumusan kebijakan negara, analisa kebijakan negara dan lain lain telah mendorong ditemukannya fokus administrasi negara. Menurut Nicholas Herry adanya paradigma baru dalam administrasi negara yaitu fokus administrasi negara adalah teori organisasi dan ilmu manajemen yang berfokus pada kepentingan publik (public interest) dan masalah publik (public affairs). Tokoh penting dalam paradigma ini adalah : Gullick, dan The National Association of Schools of Public Affairs and Administration (NASPAA).

Tabel 10. Lanjutan tabel 10. pergeseran paradigma administrasi publik

Paradigma 6 (1978)	Paradigma <i>Good Governance</i> (1978) Yaitu ereformasi sistem administrasi negara dengan membuka sistem kemitraan negara dan swasta lebih dikenal dengan mewirauahakan birokrasi dengan merubah pola kerja birokrasi yang semula beorientasi sebagai pelayan birokrasi berubah menjadi pelayanan terhadap masyarakat. Dengan menggunakan ilmu bisnis mereformasi birokrasi pemerintah agar efektif dan efisien berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik (<i>Good Governace</i>) yaitu: a) patisipasi (<i>participation</i>); b) aturan hukum (<i>rule of law</i>); c) transparansi (<i>transparency</i>); d) daya tanggap (<i>responsiveness</i>); e) berorientasi konsensus (<i>consensus orentation</i>); f) berkeadilan (<i>equity</i>); g) efektifitas dan efisiensi (<i>effectiveness and efficiecy</i>); h) akuntabilitas (<i>accountability</i>); 1) visi strategis (<i>strategic vision</i>); j) saling keterbukaan (<i>interrelated</i>)
--------------------	--

Berdasarkan paradigma dan pendapat para ahli diatas penelitian sangat berkaitan dengan paradigma ke 6 yaitu paradigma *Good Governance* yang melandaskan pada patisipasi (*participation*); aturan hukum (*rule of law*); transparansi (*transparency*); daya tanggap (*responsiveness*); berorientasi konsensus (*consensus orentation*); berkeadilan (*equity*); efektifitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiecy*); akuntabilitas (*accountability*); visi strategis (*strategic vision*) dan saling keterbukaan (*interrelated*).

a) Jenis – Jenis Kebijakan Publik

Jenis-jenis kebijakan publik menurut Anderson (2003) sebagai berikut:

(1) Kebijakan Substantif Versus Kebijakan Prosedural

Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

(2) Kebijakan Distributif Versus Kebijakan Regulatori Versus Kebijakan Redistributif

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

(3) Kebijakan Materal Versus Kebijakan Simbolik

Kebijakan materal adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

(4) Kebijakan Yang Berhubungan Dengan Barang Umum (*Public Goods*) dan Barang Privat (*Privat Goods*)

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Berdasarkan teori diatas penelitian yang akan dilakukan adalah berhubungan dengan kebijakan substantif. Kebijakan substantif dalam penelitian ini adalah keputusan yang dapat diambil oleh pemerintah berupa memilih alternatif kebijakan yang dianggap benar dan tepat untuk mengatasi permasalahan pembangunan di Desa Dermaji.

3. **Proses Formulasi Kebijakan Publik**

Para ahli dalam merumuskan proses kebijakan publik dilakukan melalui berbagai tahapan. Menurut Henry (Dalam Suwitri, 2013) menyatakan bahwa mempelajari kebijakan dapat dilihat dari sisi proses. Proses merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tahapan-tahapan dari awal hingga akhir. Menurut Winarno (2011) memandang proses kebijakan sebagai proses pembuatan kebijakan yang berbeda dengan perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan merujuk pada aspek-aspek bagaimana masalah-masalah menjadi perhatian aktor pembuat kebijakan, bagaimana kebijakan dipilih dari berbagai alternatif yang saling bersaing. Pembuatan kebijakan merupakan keseluruhan tahap dalam kebijakan publik yang berupa rangkaian keputusan.

a) Tahapan Dalam Formulasi Kebijakan Publik

Proses formulasi kebijakan publik merupakan proses yang kompleks dikarenakan melalaui tahapan proses maupun variabel yang harus dikaji. Tahap-tahap proses formulasi kebijakan publik menurut Dunn dalam Winarno (2011) adalah sebagai berikut :

b) Tahap penyusunan agenda

Sebelum permasalahan masuk dalam agenda kebijakan dilakukan penentuan skala prioritas untuk dimasukan ke dalam agenda kebijakan aktor pembuat kebijakan. Pada tahap ini, karena alasan tertentu suatu masalah tidak disentuh sama sekali atau ditunda dalam waktu yang tidak ditentukan, sementara masalah yang lain dipilih menjadi fokus pembahasan Winarno (2011).

(1) Tahap formulasi kebijakan

Permasalahan yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas, didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik oleh para pembuat kebijakan menggunakan alternatif yang dipilih dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*). Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk

dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik Winarno (2011).

(2) Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya memilih salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari suara mayoritas, kesepakatan antara aktor atau putusan pengadilan Winarno (2011).

(3) Tahap Implementasi Kebijakan.

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi wacana apabila program tersebut tidak diimplementasikan badan-badan pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya manusia dan finansial. Pada tahap implementasi ini terjadi persaingan berbagai kepentingan. Beberapa implementasi kebijakan mendapatkan dukungan dan beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh *implementors* Winarno (2011).

(4) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini, kebijakan yang sudah dilaksanakan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana dampak kebijakan yang sudah dilaksanakan. Evaluasi kebijakan memiliki ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar penilaian, apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan berdampak sesuai tujuan yang diinginkan atau belum Winarno (2011).

c) Kebijakan Pembangunan

(1) Konsep Kebijakan Pembangunan

Secara etimologi, konsep pembangunan meliputi *anatomi* (bentuk), *fisiologi* (kehidupan), *behavioral* (perilaku), (Rosana, 2018). Pembangunan merupakan upaya perubahan menuju peningkatan kehidupan yang lebih baik. Tanpa adanya pembangunan, suatu negara atau daerah tidak dapat mensejahterakan masyarakat (Handoyo, 2016). Perencanaan kebijakan pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk merubah kondisi masyarakat menyangkut semua aspek kehidupan fisik-nonfisik, material-spiritual menuju kondisi yang lebih baik (Rosana, 2018). Sementara pembangunan berwawasan lingkungan merupakan pola kebijaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk tidak mengganggu keseimbangan ekosistem yaitu pembangunan yang berorientasi kepada pengelolaan sumber daya alam sekaligus melakukan upaya perlindungan dan pengembangannya. Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan, Lonerger menegaskan bahwa terdapat tiga (3) dimensi penting yang harus menjadi pertimbangan. Ketiga dimensi tersebut adalah:

1. Dimensi ekonomi yang menghubungkan antara pengaruh-pengaruh unsur makroekonomi dan mikroekonomi pada lingkungan dan bagaimana sumberdaya alam diperlakukan dalam analisis ekonomi.
2. Dimensi politik yang mencakup proses politik yang menentukan penampilan dan sosok pembangunan, pertumbuhan penduduk, dan degradasi lingkungan pada

semua negara. Dimensi ini juga termasuk peranan agen masyarakat dan struktur sosial dan pengaruhnya terhadap lingkungan.

3. Dimensi Sosial Budaya yang mengaitkan antara tradisi atau sejarah dengan dominasi ilmu pengetahuan barat, serta pola pemikiran dan tradisi agama. Ketiga dimensi ini berintegrasi satu sama lain untuk mendorong terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan (Rosana, 2018).

Dalam konsep pembangunan terdapat konsep ekonomi biru. Konsep ini diperkenalkan oleh Pauli (2011) dalam buku karyanya berjudul “*Blue Economy: 10 Years-100 Initiatives-100 Million Jobs*” mengungkapkan beberapa pokok terkait konsep ekonomi biru. Konsep tersebut mengacu pada efisiensi sumber daya alam, sistem produksi tanpa menyisakan limbah, kepedulian sosial (*social inclusivness*), pemerataan sosial, kesempatan kerja serta inovasi (Pauli, 2011). Ekonomi biru dikembangkan untuk menjawab tantangan bahwa sistem ekonomi dunia bersifat untuk kepentingan sendiri dan merusak lingkungan sehingga menghasilkan limbah-limbah yang secara langsung dibuang ke alam (Pauli, 2011). Inti dari konsep ekonomi biru adalah pembangunan secara berkelanjutan (*sustanable development*) yang merupakan sebagai koreksi untuk tujuan pertumbuhan ekonomi, rakyat sejahtera, serta laut dan langit tetap biru (Pauli, 2011).

Konsep ekonomi biru juga menggambarkan sebagai langkah nyata pemerintah menuju pilar pembangunan berkelanjutan. Ekonomi biru dapat dilihat dari tindakan yang bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara komperhensif guna mencapai pembangunan nasioanal secara keseluruhan (Astuti *et al.*, 2021). Pembangunan berbasis ekonomi biru akan bersinergi. Pelaksanaan “*Triple Track Strategy*” yaitu

pro-poor (pengentasan kemiskinan), *pro-growth* (pertumbuhan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja) dan ditambah satu strategi pembangunan *pro-environment* (mengantisipasi lingkungan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim) (Astuti *et al.*, 2021).

Pro-growth dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan dengan mengutamakan ekspor dan investasi. *Pro-growth* strategy mencakup strategi pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang meliputi usaha mikro dengan fokus pada kesempatan berusaha dan stabilitas pendapatan, usaha kecil yang berfokus pada produk dan jasa, efisiensi usaha dan daya saing serta usaha menengah dengan fokus pada kontribusi pertumbuhan ekonomi dan daya saing (Lisna *et al.*, 2013).

Pro-job menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan kerja (Lisna *et al.*, 2013). Strategi penanggulangan kemiskinan meliputi, pemberdayaan masyarakat miskin, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk peningkatan produktifitas atau kapasitas; program keluarga berencana dan program-program lainnya untuk mengendalikan penduduk; pertumbuhan berkualitas (*pro-poor* dan *pro-job*), pengendalian inflasi, stabilisasi harga kebutuhan pokok, kebijakan subsidi, bantuan sosial untuk peningkatan daya beli, ketersediaan fasilitas (*supply*), kesehatan, pendidikan, air bersih, hukum, infrastruktur lainnya untuk meningkatkan terhadap pelayanan dasar dan ketersediaan informasi pasar, akses terhadap sumberdaya produktif (*modal*, *kredit*), pemberdayaan UMKM untuk peningkatan akses pasar (Lisna *et al.*, 2013; Ravallion, 2004).

Pro-job strategy mencakup, peningkatan kapasitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja dan kebijakan atau program

sektor riil didukung dengan iklim investasi dan kerangka regulasi, kerangka anggaran, kerangka kerjasama dengan swasta dan lain sebagainya (Ravallion, 2004). Peningkatan kapasitas tenaga kerja dapat dengan memberikan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan kepada tenaga kerja sehingga meningkatkan kemampuan dan keahlian dari tenaga kerja tersebut. Pemberian perlindungan tenaga kerja dapat dilakukan melalui pemberian jaminan asuransi, kesehatan, kecelakaan dan jaminan hari tua bagi masing-masing tenaga kerja (Lisna *et al.*, 2013; Ravallion, 2004).

Program-propoor dilakukan melalui pendekatan seperti merevitalisasi pertanian, kehutanan, kelautan dan ekonomi pedesaan untuk mengurangi kemiskinan (Astuti *et al.*, 2021). Program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi tiga klaster yaitu; program bantuan sosial berbasis keluarga, program pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil kerja (Lisna *et al.*, 2013; Ravallion, 2004).

Konsep pembangunan berkelanjutan atau dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga menjadi agenda pembangunan dunia yang memiliki 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan bersama oleh pemerintah lintas negara pada resolusi PBB sebagai agenda pembangunan dunia untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi yang disepakati pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030 (Mulyani, 2016). Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan menetapkan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; 1) lingkungan; 2) sosial dan 3) ekonomi (Mulyani, 2016). Dalam 17 tujuan SDGS meliputi masalah masalah pembangunan yang berkelanjutan. Termasuk didalamnya adalah

pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut. Adapun tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan dikutip dari Mulyani, (2016) adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Matrik Sustainable Development Goals (SDGs)

No	Tujuan
1.	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun
2.	Mengakhiri kelaparan mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendukung pertanian berkelanjutan
3.	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
4.	Menjamin pendidikan yang inklusif dan setara secara kualitas dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua
5.	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
6.	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
7.	Menjamin akses terhadap energy yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua
8.	Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penyerapan tenaga kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua
9.	Membangaun infrastruktur berketahanan mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi
10.	Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara
11.	Mewujudkan kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
12.	Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
13.	Segara mengambil tindakan untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya
14.	Segara mengambil tindakan untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya

Tabel 12..lanjutan tabel 12. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

15.	Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya maritim, dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan
16.	Melindungi, memulihkan, , dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan penggurunan, serta menghentikan dan mengembalikan degradasi tanah dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
17.	Memperjuangkan masyarakat damai dan inklusi, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, bertanggung jawab, dan inklusif pada semua tingkat
18.	Menguatkan perangkat implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan

Prinsip dasar dalam proses pembangunan adalah penekanan pada pertumbuhan ekonomi dengan hasil pembangunan yang tidak semata-mata mendasarkan pada adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output yang dihasilkan akan tetapi juga harus mendasarkan pada perubahan struktur berbagai sektor perekonomian seperti lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik (Hasan & Azis, 2018). Untuk mencapai hal tersebut baik di negara berkembang maupun industri maju, proses pertumbuhan secara serentak mengarahkan kepada tiga prinsip kunci yaitu berfokus pada semua aset: modal fisik, sumber daya manusia dan alam, menyelesaikan aspek-aspek distributif sepanjang waktu, serta menekankan kerangka kerja institusional bagi pemerintahan yang baik (Hasan & Azis, 2018).

Negara Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat (TPB) sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for*

Sustainable Development (PPN Kementerian, 2020). Dalam pelaksanaan pencapaian TPB, pemerintah memandang perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (PPN Kementerian, 2020).

Indonesia juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan 2020-2024, sehingga substansi yang terkandung dalam TPB/SDGs telah selaras dengan RPJMN. Jumlah target TPB/SDGs yang telah diintegrasikan dengan RPJMN tahun 2020-2024 berjumlah sebanyak 124 target (PPN Kementerian, 2020).

Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mensukseskan pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia karena bagi Indonesia melaksanakan TPB/SDGs sejatinya adalah melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional dan dukungan Indonesia untuk keberhasilan pencapaian Agenda 2030 di tingkat global (PPN Kementerian, 2020). Upaya Pemerintah untuk melaksanakan perumusan RAN dan RAD sesuai dengan periode pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, juga merupakan bentuk komitmen yang tinggi terhadap TPB/SDGs. Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran TPB/SDGs akan disusun 3 (tiga) dokumen perencanaan, yaitu: Peta Jalan (road map) TPB/SDGs, Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi.

Untuk menyusun Rencana Aksi TPB/SDGs tersebut telah disusun pedoman sebagai panduan kepada seluruh pemangku

kepentingan, baik di tingkat nasional maupun di daerah maupun (PPN Kementerian, 2020). *Sustainable Development Goals* SDGs Desa adalah pembangunan total atas desa. Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat (*no one left behind*) (Alisjahbana, Murniningtyas, 2018; KDPDTT, 2020). Pembangunan desa mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan. Yaitu:

Tabel 13. *Sustainable Development Goals* /SDGs Desa

No	Tujuan
1.	Desa tanpa kemiskinan
2.	Desa tanpa kelaparan
3.	Desa sehat dan sejahtera
4.	Pendidikan desa berkualitas
5.	Keterlibatan perempuan desa
6.	Desa layak air bersih dan sanitasi
7.	Desa berenergi bersih dan terbarukan
8.	Pertumbuhan ekonomi desa dan merata
9.	Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan
10.	Desa tanpa kesenjangan
11.	Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman
12.	Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan
13.	Desa tanggap perubahan iklim
14.	Desa peduli lingkungan laut
15.	Desa peduli lingkungan darat
16.	Desa damai berkeadilan
17.	Kemitraan untuk pembangunan desa
18.	Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Pada proses partisipatif, pembangunan berkelanjutan tidak diartikan sebagai suatu kebijakan yang lahir dari minoritas pembuat kebijakan. Namun menekankan pada peran penting masyarakat dan kaum minoritas di dalamnya bagaimana keikutsertaan beragam pemangku kepentingan dalam menentukan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya (Mulyadi *et al.*, 2015). Hubungan konsep pembangunan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah,

permasalahan dalam pembangunan yang akan dilihat melalui 3 dimensi, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan.

(2) Perencanaan Pembangunan Sebagai Proses Formulasi Kebijakan Substantif Dalam Pembangunan.

Perencanaan adalah suatu cara kapan, bagaimana, dan oleh siapa mencapai tujuan sebaik-baiknya (*Maximum Output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien (Alfiaturrahman, 2016). Sebuah rencana pembangunan yang sudah disusun akan bisa diimplementasikan apabila dituangkan dalam sebuah kebijakan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut diperlukan instrumen payung hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan Winarno (2011).

Dari pendapat para ahli diatas menegaskan terkait perencanaan pembangunan sebagai kebijakan pembangunan. Hubungan Perencanaan Pembangunan Sebagai proses formulasi kebijakan substantif dalam pembangunan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, Formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan perencanaan pembangunan untuk diimplementasikan dengan tujuan untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan di Desa Dermaji.

4. Formulasi Kebijakan Pembangunan

a) Konsep Formulasi Kebijakan Pembangunan

Formulasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam mengkaji kebijakan pembangunan, karena banyak sekali perumus kebijakan yang gagal dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam mencapai tujuan-tujuannya. Kegagalan tersebut sebagian besar bersumber pada tidak sempurnanya tahapan formulasi kebijakan Winarno (2011).

Formulasi kebijakan merupakan tahap perumusan masalah kebijakan, penyusunan agenda kebijakan, perumusan usulan

kebijakan, pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian atau evaluasi kebijakan (Rosmayanti *et al.*, 2021) .

Hubungan konsep kebijakan pembangunan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari konsep kebijakan pembangunan yang di formulasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dermaji.

b) Proses Fomulasi Kebijakan Pembangunan.

Menurut Kingdon (1995, 2013) bahwasanya terdapat tiga arus utama dalam formulasi kebijakan publik yaitu *problem streams*, *policy streams* dan *political streams*.

(1) Arus masalah (*Problem Stream*)

Arus masalah (*problem stream*) merupakan tahapan agenda setting dalam proses formulasi kebijakan (Kingdon, 1995, 2013), mengapa kondisi sosial tertentu dipermasalahkan dan dijadikan sebagai agenda kebijakan?. Arus masalah muncul menjadi isu penting seiring meningkatnya perhatian pada suatu masalah sebagai akibat dari peristiwa besar (Amanta & Kusumasari, 2019).

Terjadinya sebuah peristiwa besar tersebut membuat Masyarakat, Akademisi, Ormas, LSM, Pengusaha secara bersama-sama mendesak pemerintah untuk dapat menangani dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Aliran masalah (*problem stream*) menekankan para pembuat kebijakan untuk memilih alternatif kebijakan yang dipandang yang mendesak dan signifikan untuk segera diselesaikan (Amanta & Kusumasari, 2019). Terdapat tiga hal yang mempengaruhi arus masalah yaitu indikator (ukuran-ukuran yang dikeluarkan oleh lembaga kredibel seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi), peristiwa besar (peristiwa yang menyita perhatian

publik seperti bencana dan pemilu), dan respon publik (Widhiarto *et al.*, 2016).

(2) Arus kebijakan (*Policy Stream*)

Arus kebijakan (*policy stream*) yaitu gagasan-gagasan yang muncul sebagai solusi atas problem kebijakan. Kingdon menganalogikan proses mencari solusi ini layaknya memasak sebuah sup, sehingga kemudian disebut dengan *policy primeval soup* (Kingdon, 1995, 2013). Aliran kebijakan (*policy stream*) menekankan pada pemberian berbagai alternatif solusi dalam menyelesaikan masalah kebijakan. Proses diawali dengan munculnya banyak gagasan yang kemudian dikombinasikan, diujikan dan dibuatkan alternatif terbaiknya (Amanta & Kusumasari, 2019).

Dalam hal ini arus kebijakan yang terdiri dari administrasi dan birokrat, memiliki tugas menyelesaikan permasalahan dikarenakan administrasi dan birokrat adalah pemerintahan yang dipilih oleh rakyat (Kingdon, 1995, 2013).

(3) Arus politik (*politics stream*)

Arus politik (*politics stream*) yaitu situasi politik yang ikut mendorong perhatian publik, khususnya *policy maker*. Aliran Politik muncul diakibatkan dari tekanan publik untuk menyelesaikan permasalahan (Kingdon, 1995, 2013). Aliran politik (*politics stream*) merujuk dinamika politik yang mempengaruhi agenda kebijakan seperti perubahan pejabat terpilih, iklim politik maupun suara-suara kelompok oposisi (Amanta & Kusumasari, 2019).

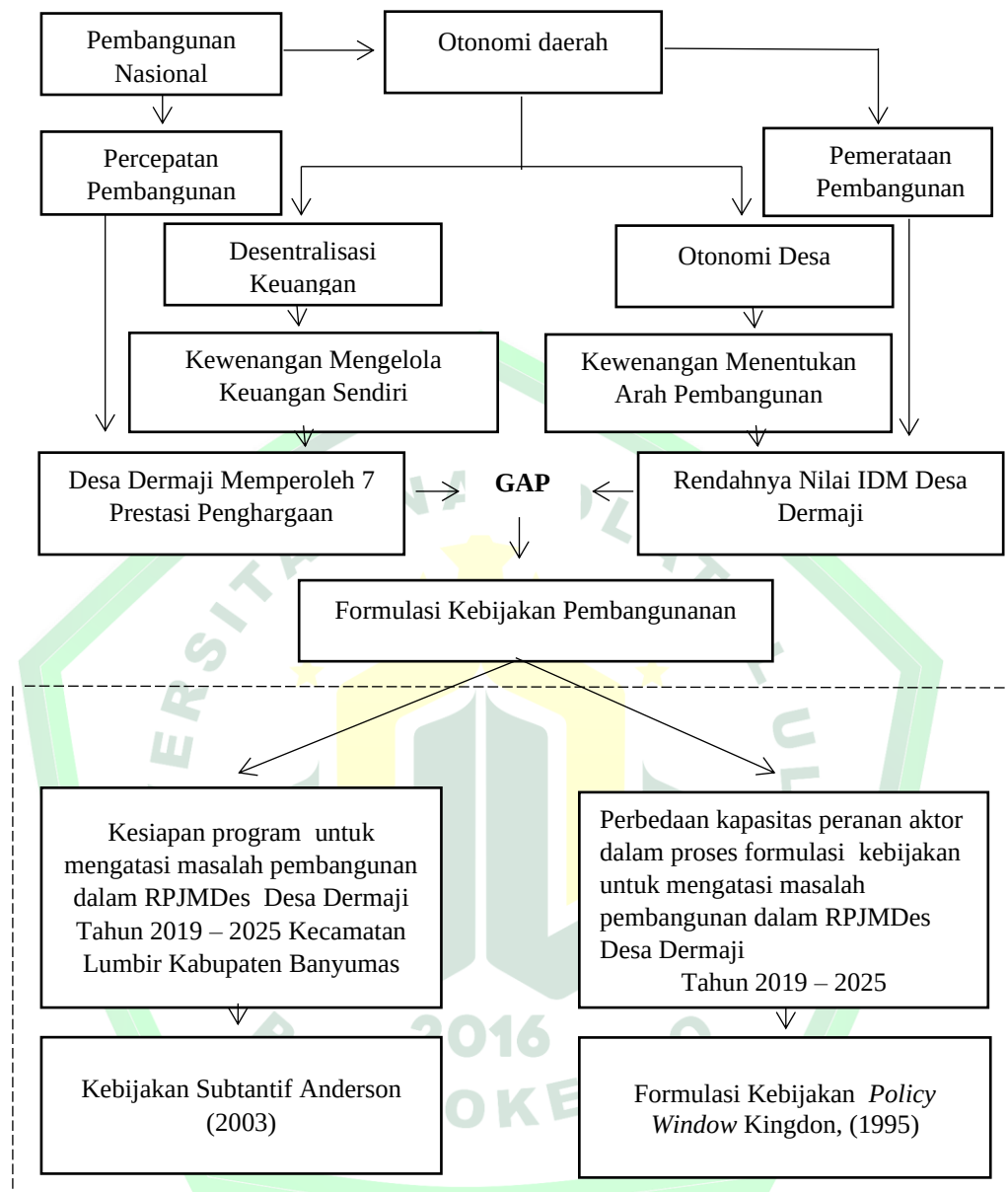
Politisi akan memandang tekanan publik digunakan sebagai alat kepentingan politik untuk menekan pemerintah dalam menyelesaikan suatu masalah. Tekanan ini terus dilakukan sehingga pemerintah dalam aliran kebijakan memiliki pemahaman yang sama dengan aliran lainnya. Elemen dari arus

politik ini adalah *national mood*, tekanan organisasi politik, dan perubahan pandangan administrator (Widhiarto *et al.*, 2016).

Arus tersebut akan dipertemukan oleh *Policy Entrepreneur* (PE) untuk membuka jendela kebijakan (*policy window*). Artinya kebijakan publik akan terbentuk jika PE mendorong dan mempertemukan ketiga arus tersebut (Kingdon, 1995, 2013). Adapun PE adalah aktor baik dari dalam ataupun luar pemerintahan yang dengan suka rela menyediakan waktu, energi, reputasi, finansial dan pegawai untuk mencapai tujuan dan nilai yang diinginkan (Kingdon, 1995, 2013).

Hubungan proses Formulasi Kebijakan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, penelitian ini akan melakukan uji beda terhadap kapasitas peran aktor dalam proses formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dermaji dengan pisau analisis *Policy Window* menurut Kingdon (2013) melalui dimensi *problem streams*, *policy streams* dan *political streams*.

C. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

———— : Garis alur penelitian
 - - - - - : Garis fokus penelitian

Gambar 1. Diagram kerangka pemikiran

D. Hipotesis

Creswell (2015,) mengemukakan bahwa hipotesis merupakan pernyataan dalam penelitian kuantitatif yang penelitiannya membuat prediksi atau dugaan tentang hasil. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau sub masalah yang diajukan oleh peneliti, yang dijabarkan dari landasan teori atau kajian teori dan masih harus diuji kebenarannya (Ummah, 2017).

Untuk menjawab pertanyaan pada penelitian yang akan dilakukan maka diperlukan sebuah hipotesis sebagai berikut:

1. Kurang siapnya program untuk mengatasi permasalahan pembangunan dalam RPJMDes Desa Dermaji Tahun 2018-2024 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.
2. Terdapat perbedaan kapasitas peranan *aktor* dalam proses formulasi kebijakan pembangunan dalam RPJMDes Desa Dermaji Tahun 2018-2024

